



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak:
- Bangka Pos
 - Babel Pos
 - Babel News
 - Radar Bangka
 - Rakyat Pos
 - Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	√														

Bulan:

1	2	3	4	5	6
			√		
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		√																						

Yulizar Wanti-wanti Kabupaten/Kota

P3D Tak Clear, Pemprov Bisa Gagal Raih WTP

PANGKALPINANG- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bangka Belitung (Babel), Yulizar Adnan mewanti-wanti agar pelimpahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari kabupaten/kota ke provinsi, tidak membuat kacau balau aset Pemprov, yang berujung pada tak bisanya Pemprov Babel meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut Yulizar, sebelum aset tersebut diserahkan, harus betul-betul clear data dan jumlahnya, serta harus sesuai dengan ketentuan, jumlah dan

sebagainya.

“Berkaca dari P3D Sumşel dulu, hingga sekarang belum tuntas-tuntas. Saat ini ketika sudah kita benerin, langkah-langkah sudah kita ikuti, penyusutan, nilai perolehan dan sebagainya, kita berharap bisa WTP, kalau nanti masuk yang datanya tak akurat, bisa ga dapat WTP kita,” kata Yulizar.

Ia sudah menekankan kepada stafnya untuk ikut mendata aset yang nantinya akan diserahkan menjadi milik Pemprov Babel, setelah clear dan tak ada masalah, baru dicatat dalam pembukuan aset.

“Bisa bahaya kita apabila tak clear, makanya saya perintahkan

harus verifikasi lagi di lapangan, yang clean and clear,” tandasnya.

Disinggung untuk kemampuan keuangan daerah untuk membiayai tunjangan guru dan sebagainya, Yulizar mengaku dengan APBD yang pas-pasan, terpaksa Pemprov Babel harus melakukan efisiensi.

“Memang menjadi beban pembiayaan, tetapi kita harus laksanakan karena ini amanat, dan kita lakukan penghematan dan efisiensi, yang belum prioritas kita tunda alihkan kesini, bantuan-bantuan yang bisa dirasionalkan kita rasionalkan, tinggal bagaimana pengelola keuangan mengutak-atik itu,” bebernya.



Untuk P3D dinas pendidikan, tenaga guru SMA/MA, SMK dan SLB negeri swasta, jumlah PNS sebanyak 1.821 orang, honor 716 orang, total 2537 orang, untuk tenaga kependidikan sekolah menengah dan SLB, PNS 293 non PNS 706, total 999, dengan jumlah sekolah 129 sekolah. (nov/10)